

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KEWIRAUSAHAAN DI SMP NEGERI 15 YOGYAKARTA

THE IMPLEMENTATION OF ENTREPRENEURIAL EDUCATION PROGRAM AT JUNIOR HIGH SCHOOL 15 YOGYAKARTA

Muhammad Luthfi Hendrato

Filsafat dan Sosiologi Pendidikan, Kebijakan Pendidikan FIP Universitas Negeri Yogyakarta

muhammad.luthfi@student.uny.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, 1) proses perencanaan pendidikan kewirausahaan di SMP Negeri 15 Yogyakarta, 2) organisasi pendidikan kewirausahaan di SMP Negeri 15 Yogyakarta, 3) implementasi program pendidikan kewirausahaan di SMP Negeri 15 Yogyakarta.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Subjek penelitian adalah Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, guru, pendamping kegiatan ekstrakurikuler dan peserta didik. Objek penelitian mengenai program pendidikan kewirausahaan. Pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman, yaitu reduksi, penyajian data, dan kesimpulan. Uji validitas data melalui triangulasi sumber, dan teknik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan inpres Nomor 4 tahun 1995 dan ditegaskan pada UU Sisdiknas No 20 Tahun 2013, sekolah menurunkan peraturan tersebut ke dalam kebijakan sekolah melalui misi. Perencanaan program ini memiliki struktur organisasi yaitu kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan pendidik. Pendidikan kewirausahaan di sekolah memiliki klasifikasi yang terdiri dari bentuk program, sarana dan prasarana, serta hasil program.

Kata kunci: *Implementasi program, pendidikan kewirausahaan, SMP Negeri 15 Yogyakarta.*

Abstract

This Research is purposed to describe, 1) Entrepreneurship education planning process at Junior High School 15 Yogyakarta, 2) Entrepreneurial Education Organization at Junior High School 15 Yogyakarta, 3) Implementation of entrepreneurship education programs at Junior High School 15 Yogyakarta.

This research uses qualitative descriptive method. The subject of research is headmaster, vice principal, teacher, companion extracurricular activities, and students. The data collecting is done with observation, interview, and documentation. The data analysis uses Miles and Huberman style, such as reduction, data display, and drawing conclusion or verification. The data validity uses source and technique triangulation.

The result shows that with the Presidential Instruction No. 4 of 1995 and affirmed in the National Education System Law No 20 of 2013, schools lower the regulation into school policy through missions. The planning of entrepreneurial education program has an organizational structure, namely the principal, vice principal, and educator. Entrepreneurship education in school has a classification consisting of the type of program, facilities, and infrastructure, and the results of the implementation.

Keyword : *Implementation Program, Entrepreneurship Education, Junior High School 15 Yogyakarta*

PENDAHULUAN

Memasuki era modern dan global, suatu negara harus memiliki daya saing untuk menghadapi segala tantangan di ranah internasional. Salah satu tantangan yaitu dinamika persaingan lapangan kerja yang semakin sulit sehingga menyebabkan jumlah pengangguran di suatu negara meningkat. Faktor yang memengaruhi peningkatan jumlah pengangguran di suatu negara salah satunya Indonesia yaitu tingkat kualitas pendidikan yang rendah dalam membentuk SDM (Sumber Daya Manusia).

Tingginya angka pengangguran yang sulit teratasi dan jumlah angkatan kerja yang semakin bertambah menyebabkan semakin kompetitifnya mendapatkan pekerjaan. Keterampilan yang kurang menyebabkan banyaknya angka pengangguran produktif sehingga pemerintah harus segera mengatasi permasalahan tersebut.

Fakta ini menunjukkan bahwa perlu adanya pendidikan kewirausahaan sejak dini pada jenjang pendidikan SMP. Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan, pada tahun 2017 telah terjadi kenaikan jumlah pengangguran di Indonesia sebesar 10.000 orang menjadi 7,04 juta orang pada dari Agustus 2016 sebesar 7,03 juta orang. (www.bps.go.id). Hal ini akan menghambat cita-cita bangsa Indonesia untuk mencapai

kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 apabila kita biarkan tanpa memberikan modal sejak dini. Melalui lembaga pendidikan, pemerintah dapat melakukan kebijakan pendidikan kewirausahaan sedini mungkin dalam lingkup pendidikan, termasuk di Sekolah Menengah Pertama dengan upaya menanamkan pendidikan kewirausahaan peserta didik agar dapat terbentuk sejak awal.

Pendidikan kewirausahaan belum diterapkan secara optimal di tingkat Sekolah Menengah Pertama. Pendidikan adalah suatu proses dalam rangka mempengaruhi siswa agar dapat menyesuaikan diri sebaik mungkin terhadap lingkungan sehingga menimbulkan perubahan dalam diri siswa untuk berfungsi dalam kehidupan masyarakat. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) Nomor 20 Tahun 2013 Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa pendidikan adalah usaha dasar yang terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar anak didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Kewirausahaan merupakan kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan

berbeda melalui berfikir kreatif dan bertindak inovatif untuk menciptakan peluang (Suryana, 2003:1). Berdasarkan uraian tersebut, pendidikan dan kewirausahaan memiliki hubungan yang sangat penting. Selain menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki keterampilan berfikir secara kreatif, pendidikan ini diharapkan dapat bertindak inovatif untuk bersaing dan membangun lapangan pekerjaan dalam dunia usaha.

Kewirausahaan berperan untuk meningkatkan kepercayaan diri, kemandirian, dan kreativitas. Untuk mampu mengorganisasi kepercayaan diri, kemandirian, dan kreativitas diperlukan pendidikan kewirausahaan. Jiwa kewirausahaan dapat dibentuk dan dikembangkan melalui pendidikan kewirausahaan. Pendidikan kewirausahaan tidak hanya berorientasi pada mencari kerja namun dapat menciptakan lapangan kerja sehingga mengurangi jumlah pengangguran dan meningkatkan kualitas SDM.

Kewirausahaan bukan hal baru di Indonesia. Paling tidak sejak Instruksi Presiden Nomer 4 Tahun 1995 tentang Gerakan Nasional Memasyarakatkan dan Membudayakan Kewirausahaan, mengamanatkan kepada seluruh masyarakat dan bangsa Indonesia untuk mengembangkan program kewirausahaan. Melalui gerakan ini diharapkan karakter

kewirausahaan semakin membumi dan dapat menghasilkan wirausahawan yang memiliki karakter kuat dan handal (Endang Mulyani, 2010: 7).

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi telah mengimplementasikan pendidikan kewirausahaan sebagai salah satu wujud nyata untuk menumbuhkan jiwa kreatif, inovatif, sportif, dan wirausahamelalui metodologi pendidikan sebagai penjabaran dari pengembangan ekonomi kreatif (Subijanto, 2012: 163). Program ini ditindak lanjuti dengan mengintegrasikan metode pembelajaran serta pendidikan kewirausahaan kedalam kurikulum sekolah (Pusat Kurikulum, 2010: 7). Lembaga Pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk kreativitas sehingga inovasi dalam pendidikan kewirausahaan dapat berjalan dengan baik. Peserta didik dilatih untuk memiliki kreativitas dalam menciptakan usaha sesuai imajinasi dan bakat yang dimilikinya. Kreativitas dipahami sebagai kemampuan melahirkan hal yang baru dan berpotensi sesuai gagasan berupa produk.

Pendidikan kewirausahaan sudah memiliki landasan hukum yang kuat. Meski demikian, masyarakat belum merespon secara proaktif. Apabila kita deskripsikan lebih lanjut, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memberikan

landasan filosofis serta sebagai prinsip dasar dalam pembangunan pendidikan. Sistem pendidikan nasional menempatkan peserta didik sebagai makhluk yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa serta memiliki tugas dalam memimpin kehidupan yang berharkat dan bermartabat dan menjadi manusia yang bermoral, berbudi luhur, mandiri, kreatif, inovatif serta berakhlak mulia. Selanjutnya, ketika kita mengkaji standar isi, standar kompetensi lulusan dan kurikulum mulai dari pendidikan usia dini hingga pendidikan menengah atas serta pendidikan non formal dalam rangka pemetaan ruang lingkup kompetensi lulusan yang terkait dengan pendidikan kewirausahaan (Pusat Kurikulum, 2010: 11).

Pendidikan kewirausahaan juga mendukung perbaikan dalam kebijakan pembangunan pendidikan nasional. Kebijakan pembangunan pendidikan nasional mengarah pada penerapan metode pendidikan yang berakhlak mulia dan berkarakter bangsa termasuk karakter wirausaha. Kebijakan tersebut di lingkungan sekolah meliputi pendidikan kewirausahaan melalui mata pelajaran, ekstrakurikuler, maupun pengembangan diri. Sarana tersebut mampu meningkatkan pemahaman peserta didik tentang kewirausahaan, inovasi produk, dan pemahaman dunia wirausaha. Oleh karena itu, peserta didik tidak menjadi pengangguran di

kemudian hari karena dapat memanfaatkan peluang usaha. Berdasarkan hal tersebut, pendidikan kewirausahaan disusun di sekolah, khususnya di jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Pendidikan Kewirausahaan belum diterapkan oleh seluruh sekolah menengah pertama di Indonesia. Beberapa sekolah sudah menerapkan pendidikan kewirausahaan diantaranya adalah SMP Negeri 15 Yogyakarta. Akan tetapi, masih diperlukan analisis tentang perencanaan kebijakan pendidikan kewirausahaan di jenjang SMP, pelaksanaan program pendidikan kewirausahaan, dan faktor-faktor yang memengaruhi pendidikan kewirausahaan peserta didik. Penelitian ini difokuskan pada implementasi pendidikan kewirausahaan di SMP Negeri 15 Yogyakarta. Sekolah ini dipilih sebagai lokasi penelitian karena SMP 15 Yogyakarta memiliki ciri khas pendidikan kewirausahaan. Selain itu, sejak awal didirikan sekolah ini menitikberatkan pada usaha pendidikan kewirausahaan yang dituangkan dalam misi “membekali jiwa kewirausahaan dan kemandirian dalam menghadapi persaingan global”. Berdasarkan hasil latar belakang di atas, maka peneliti mengambil topik penelitian “Implementasi Pendidikan Kewirausahaan di SMP Negeri 15 Yogyakarta.”.

Subyek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, guru, pendamping kegiatan ekstrakurikuler dan peserta didik SMP Negeri 15 Yogyakarta.

Waktu dan Tempat Penelitian

Pra penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Juni 2018. Sedangkan penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli 2018 –Agustus 2018. Dalam penelitian ini, tempat yang dipilih oleh peneliti adalah di SMP Negeri 15 Yogyakarta.

Data, Instrumen, dan Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan peneliti. Data penelitian ini bersifat deskriptif berupa dokumen pribadi, catatan harian, catatan lapangan, ataupun ucapan responden dari hasil wawancara. Teknik yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Teknik analisis Data

Analisis data diperoleh dengan langkah-langkah sebagai berikut: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perencanaan dan Perumusan Program Pendidikan Kewirausahaan

Pendidikan memiliki peran penting terhadap pendidikan kewirausahaan. Sebelum pelaksanaan, program ini pasti memiliki latar belakang dan perencanaan dengan beberapa pihak. Berikut uraian perencanaan dan perumusan program pendidikan kewirausahaan.

Pengembangan kemampuan melalui keterampilan terhadap peserta didik perlu dilaksanakan sejak dini. Pengembangan tersebut melalui pendidikan kewirausahaan. Pendidikan kewirausahaan di SMP menjadi modal awal peserta didik di dunia wirausaha.

Pendidikan kewirausahaan itu membutuhkan proses yang panjang. Apabila sejak di sekolah menengah ini sudah kita siapkan, kedepannya peserta didik dapat meneruskan ilmu yang diberikan. Selanjutnya, dengan adanya pendidikan kewirausahaan, peserta didik akan memiliki keterampilan serta jiwa wirausaha, seperti kepemimpinan, tanggung jawab, disiplin, kreatif, inovatif, kerja keras, kerja sama, dan komunikatif.

Pendidikan kewirausahaan dikembangkan sejak instruksi presiden nomor 4 tahun 1995 tentang Gerakan Nasional Memasyarakatkan dan Membudayakan Kewirausahaan yang mengamanatkan kepada masyarakat untuk mengembangkan program kewirausahaan. Hal ini ditegaskan dengan peraturan UU Sisdiknas Nomor 20 tahun 2013

tentang pengertian pendidikan yang salah satu tujuannya untuk mengembangkan keterampilan. Pengembangan keterampilan ini dapat berupa pendidikan kewirausahaan bagi peserta didik di sekolah. Peraturan tersebut diturunkan ke dalam visi dan misi sekolah yang akhirnya diwujudkan dengan kebijakan sekolah yaitu program pendidikan kewirausahaan.

Organisasi Program Pendidikan Kewirausahaan di SMP Negeri 15 Yogyakarta

Perencanaan dan perumusan program sekolah memerlukan kerjasama beberapa pihak yang terdiri atas kepala sekolah, komite sekolah, guru, dan warga sekolah lainnya. Mereka terlibat sebagai perumus dan menentukan visi misi sekolah yang akan dilaksanakan. Oleh karena itu, perencanaan yang matang memegang peranan penting dalam ketercapaian tujuan. Penanggung jawab dalam program pendidikan kewirausahaan yaitu Kepala Sekolah. Secara pelaksanaan, wakil kepala sekolah bagian kurikulum yang memiliki tanggung jawab serta dibantu oleh wakil kepala sekolah bagian kesiswaan dan dikembangkan oleh pendidik dalam pelaksanaannya di kelas.

Hal ini sesuai dengan (Mardia, 2012) yang mengemukakan bahwa perencanaan merupakan gambaran terkait kegiatan dan struktur organisasi sebagai petunjuk pelaksanaan serta mempermudah untu

mengarahkan suatu pekerjaan karena dalam perencanaan terdapat target pencapaian. Perencanaan dapat menjadi penentu keberhasilan serta bahan analisa terhadap kebenaran dan kinerja seseorang secara individu maupun kelompok. Dalam proses pembelajaran, perencanaan dapat diartikan sebagai suatu proses mempersiapkan secara sistematis, cara mencapai tujuan dengan maksimal dan penentuan tujuan yang akan dicapai.

Implementasi Pendidikan Kewirausahaan di SMP Negeri 15 Yogyakarta

Pelaksanaan program pendidikan kewirausahaan di sekolah ini sudah ada sejak tahun 1997 awal didirikannya SMP Negeri 15 Yogyakarta. Proses pelaksanaan pendidikan kewirausahaan dikembangkan melalui kegiatan terpadu di sekolah. Hal ini sesuai dengan pendapat Endang Mulyani, dkk (2010:58) yang menyatakan pendidikan kewirausahaan diimplementasikan secara terpadu dengan kegiatan di sekolah.

Pelaksanaan program pendidikan kewirausahaan di sekolah memiliki klasifikasi yang terdiri dari 1) jenis program keterampilan, *project base learning*, market day, 2) bentuk program ekstrakurikuler, intrakurikuler, kultur sekolah, 3) tujuan program agar peserta didik memiliki keterampilan dan nilai-nilai kewirausahaan, 4) produk yang dihasilkan berupa aksesoris, proposal perencanaan usaha,

olahan barang bekas, 5) sarana dan prasarana seperti bengkel keterampilan, koperasi, 6) hasil pelaksanaan berupa nilai-nilai kepemimpinan, tanggung jawab, disiplin, kreativitas, inovatif, kerja keras, kerjasama, dan komunikatif.

Hal ini sejalan dengan Kemendiknas (2010:10), yang menyatakan bahwa terdapat nilai-nilai kewirausahaan yang sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik yang akan diintegrasikan melalui pendidikan kewirausahaan, yaitu nilai kepemimpinan, nilai tanggung jawab, nilai disiplin, nilai kreatifitas, nilai inovatif, nilai kerja keras, nilai kerja sama, serta nilai komunikatif.

KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan kebijakan pendidikan kewirausahaan di SMP Negeri 15 Yogyakarta dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendidikan kewirausahaan di SMP Negeri 15 Yogyakarta berlandaskan dengan peraturan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1995 tentang Gerakan Nasional Memasyarakatkan dan Membudayakan Kewirausahaan dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2013 Pasal 1 ayat (1) tentang pengembangan potensi keterampilan. Sekolah menurunkan

peraturan tersebut ke dalam kebijakan sekolah melalui misi sekolah dan mengaplikasikan ke program pendidikan kewirausahaan.

2. Perencanaan program pendidikan kewirausahaan ini memiliki struktur organisasi yaitu kepala sekolah sebagai penanggung jawab, wakil kepala sekolah kesiswaan dan kurikulum sebagai koordinator pelaksana, dan pendidik yang mengembangkan dalam pembelajaran di kelas.
3. Pelaksanaan pendidikan kewirausahaan dilaksanakan melalui berbagai cara, diantaranya terintegrasi melalui mata pelajaran, kegiatan ekstrakurikuler, dan kultur sekolah. Pendidikan kewirausahaan juga menanamkan nilai-nilai kewirausahaan kepada peserta didik yang terdiri atas kepemimpinan, tanggung jawab, disiplin, kreativitas, inovatif, kerja keras, kerja sama, serta komunikatif.

b. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh tentang Implementasi Pendidikan Kewirausahaan di SMP Negeri 15 Yogyakarta, penulis menyampaikan saran sebagai berikut;

1. Nilai-nilai kewirausahaan diintegrasikan ke seluruh mata pelajaran dengan cara mengidentifikasi materi dalam silabus yang sesuai. Untuk mengintegrasikan diperlukan pemahaman guru berkaitan dengan wawasan kewirausahaan.
2. Kegiatan kewirausahaan melalui ekstrakurikuler di masukkan ke dalam laporan hasil belajar siswa supaya orang tua juga memiliki peran dalam pendidikan kewirausahaan dan menjadi motivasi bagi peserta didik.
3. Pengoptimalan fasilitas sekolah seperti menjalin kerja sama dengan pihak terkait, atau wirausahawan serta menambah koleksi buku-buku yang berhubungan dengan kewirausahaan agar pengetahuan peserta didik terhadap pendidikan kewirausahaan semakin berkembang.
4. Program pendidikan kewirausahaan ini dapat dijadikan sebagai transfer gagasan kebijakan pendidikan kewirausahaan di sekolah menengah pertama lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Alma, Buchari. 2013. *Kewirausahaan*. Bandung: Alfabeta.
- Cresswell, John W. 2010. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Penerjemah: Achmad Fawaid. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Danuhadimedjo, Djatmiko. (1998). *Kewirausahaan dan Pembangunan*. Bandung: Alfabeta
- Eman Suherman. 2008. *Desain Pembelajaran Kewirausahaan*. Bandung: Alfabeta.
- Eman Suherman. (2010). *Desain Pembelajaran Kewirausahaan*. Bandung: Alfabeta
- Endang Mulyani, dkk (2010). *Pengembangan Pendidikan Kewirausahaan*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kurikulum
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisis*. Gava Media: Yogyakarta
- Kasmir. 2013. *Kewirausahaan-Edisi Revisi*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Kementerian Pendidikan Nasional. 2010. *Pengembangan Pendidikan Kewirausahaan. Bahan Pelatihan Penguatan Metodologi Pembelajaran Berdasarkan Nilai-Nilai Budaya untuk Membentuk Daya Saing*

- dan Karakter Bangsa*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum.
- Mardiahayati. 2012. *Desain Pembelajaran Berbasis Karakter*. Pekanbaru: Al-Mujtahadah.
- Moleong, M. A. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya.
- Mudasir. 2012. *Desain Pembelajaran*. Indragiri Hulu : STAI Nurul Falah.
- Rahmat Rais. 2009. *Modal Sosial Sebagai Strategi Pengembangan Madrasah*. Litbang dan Diklat Departemen Agama RI.
- Sarbini dan Neneng Linda. 2011. *Perencanaan Pendidikan*. Bandung : Pustaka Setia
- Sardiman dkk. 2008. *Pembelajaran IPS Terpadu 2*. Jakarta: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto. 2005. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suryana, 2006. *Kewirausahaan*. Salemba 4 : Jakarta.
- Suryana. 2003. *Kewirausahaan: Pedoman praktis, kiat dan proses menuju sukses (Edisi Revisi)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses. (Edisi Revisi)*. Media Pressindo: Yogyakarta.
- Yuyus Suryana dan Kartib Bayu. 2010. *Kewirausahaan: Pendekatan Karakteristik Wirausahawan Sukses*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Subijanto. 2012. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Vol. 18, Nomor 2, Juni 2012: Pusat kurikulum, bahan pelatihan penguatan metodologi pembelajaran berdasarkan nilai-nilai budaya untuk membentuk daya saing dan karakter bangsa*. Pengembangan pendidikan kewirausahaan. Jakarta: pusat kurikulum